



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 183/KMA/SK/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PERESMIAN OPERASIONAL  
PENGADILAN BARU

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016, Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2016, Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 perlu ditetapkan tanggal dan tempat peresmian operasional Pengadilan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penetapan Tanggal

dan Tempat Peresmian Operasional Pengadilan Baru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PERESMIAN OPERASIONAL PENGADILAN BARU.
- KESATU : Menetapkan peresmian operasional Pengadilan baru pada tanggal 22 Oktober 2018 bertempat di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.
- KEDUA : Daftar Pengadilan baru yang akan diresmikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 September 2018



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
6. Pengadilan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 183 /KMA/SK/IX/2018  
TANGGAL : 18 September 2018

DAFTAR PERESMIAN PENGADILAN BARU

NO	PENGADILAN BARU	KELAS	DAERAH HUKUM
KEPPRES NOMOR 13 TAHUN 2016			
1	Pengadilan Agama Nanga Bulik	II	Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
2	Pengadilan Agama Sukamara	II	Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah
3	Pengadilan Agama Kuala Pembuang	II	Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
4	Pengadilan Agama Kasongan	II	Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
5	Pengadilan Agama Tamiyang Layang	II	Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
6	Pengadilan Agama Pulang Pisau	II	Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
7	Pengadilan Agama Kuala Kurun	II	Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
8	Pengadilan Agama Penajam	II	Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
9	Pengadilan Agama Sendawar	II	Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur

NO	PENGADILAN BARU	KELAS	DAERAH HUKUM
10	Pengadilan Agama Belopa	II	Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan
11	Pengadilan Agama Pasangkayu	II	Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat
12	Pengadilan Agama Malili	II	Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan
13	Pengadilan Agama Ampara	II	Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah
14	Pengadilan Agama Wangi Wangi	II	Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara
15	Pengadilan Agama Lasusua	II	Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
16	Pengadilan Agama Rumbia	II	Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara
17	Pengadilan Agama Lolak	II	Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara
18	Pengadilan Agama Bolaang Uki	II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara
19	Pengadilan Agama Boroko	II	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara
20	Pengadilan Agama Tutuyan	II	Kabupaten Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara
21	Pengadilan Agama Suwawa	II	Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo
22	Pengadilan Agama Kwandang	II	Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo

NO	PENGADILAN BARU	KELAS	DAERAH HUKUM
23	Pengadilan Agama Dataran Hunipopu	II	Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku
24	Pengadilan Agama Dataran Hunimoa	II	Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku
25	Pengadilan Agama Namlea	II	Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
26	Pengadilan Agama Kaimana	II	Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat
KEPTRES NOMOR 14 TAHUN 2016			
27	Pengadilan Negeri Ilanggudie	II	Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh
28	Pengadilan Negeri Meureudu	II	Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh
29	Pengadilan Negeri Suka Makmur	II	Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh
30	Pengadilan Negeri Sei Rampah	II	Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara
31	Pengadilan Negeri Sibuhuan	II	Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara
32	Pengadilan Negeri Pulau Panjang	II	Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
33	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	II	Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
34	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	II	Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
35	Pengadilan Negeri Mukomuko	II	Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu

NO	PENGADILAN BARU	KELAS	DAERAH HUKUM
36	Pengadilan Negeri Gedong Tataan	II	Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung
37	Pengadilan Negeri Koba	II	Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
38	Pengadilan Negeri Mentok	II	Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
39	Pengadilan Negeri Banjar	II	Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat
40	Pengadilan Negeri Cikarang	II	Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
41	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	II	Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
42	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	II	Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
43	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	II	Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
44	Pengadilan Negeri Paringin	II	Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan
45	Pengadilan Negeri Penajam	II	Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
46	Pengadilan Negeri Melonguane	II	Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara
47	Pengadilan Negeri Lasusua	II	Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
48	Pengadilan Negeri Wangi Wangi	II	Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara
49	Pengadilan Negeri Belopa	II	Kabupaten Lusu, Provinsi Sulawesi Selatan



NO	PENGADILAN BARU	KELAS	DAERAH HUKUM
50	Pengadilan Negeri Dobo	II	Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku
51	Pengadilan Negeri Namlea	II	Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
52	Pengadilan Negeri Kaimana	II	Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat
KEPPRES NOMOR 15 TAHUN 2016			
53	Pengadilan Agama Sibuhuan	II	Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara
54	Pengadilan Agama Sei Rampah	II	Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara
55	Pengadilan Agama Pulau Punjung	II	Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
56	Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	II	Kabupaten Siak, Provinsi Riau
57	Pengadilan Agama Teluk Kuantan	II	Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
58	Pengadilan Agama Mukomuko	II	Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu
59	Pengadilan Agama Bintuhan	II	Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu
60	Pengadilan Agama Tais	II	Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu
61	Pengadilan Agama Kepahiang	II	Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu
62	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	II	Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

NO	PENGADILAN BARU	KELAS	DAERAH HUKUM
63	Pengadilan Agama Martapura	II	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan
64	Pengadilan Agama Muaradua	II	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan
65	Pengadilan Agama Pagar Alam	II	Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan
66	Pengadilan Agama Prabumulih	II	Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan
67	Pengadilan Agama Gedong Tataan	II	Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Lampung
68	Pengadilan Agama Pringsewu	II	Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung
69	Pengadilan Agama Mesuji	II	Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung
70	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	II	Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung
71	Pengadilan Agama Sukadana	II	Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung
72	Pengadilan Agama Soreang	II	Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
73	Pengadilan Agama Ngamprah	II	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
74	Pengadilan Agama Singkawang	II	Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat
75	Pengadilan Agama Nanga Pinoh	II	Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat

NO	PENGADILAN BARU	KELAS	DAERAH HUKUM
76	Pengadilan Agama Sungai Raya	II	Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
KEPPRES NOMOR 16 TAHUN 2016			
77	Mahkamah Syar'iyah Blangpidie	II	Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh
78	Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue	II	Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh
79	Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam	II	Kota Subulussalam, Provinsi Aceh
KEPPRES NOMOR 17 TAHUN 2016			
80	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang	II	Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
81	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo	II	Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Gorontalo
KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 2016			
82	Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu	II	Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku
83	Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa	II	Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku

NO	PENGADILAN BARU	KELAS	DAERAH HUKUM
84	Pengadilan Negeri Sanana	II	Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
85	Pengadilan Negeri Bobong	II	Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara

  
KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
  
MUHAMMAD HATTA ALI